

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan melalui Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

Novi Natalia Padang^{1*}, Antonius M. Purba², Roslinda Sagala³, Elisabeth Simangunsong⁴

^{1*,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

^{3,4}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}novipadang06@gmail.com, ²ampurba1962@gmail.com, ³roslindasagala@gmail.com, ⁴elisabeth081966@gmail.com

Corresponding Author

Nama Penulis : Novi Natalia Padang

Email : novipadang06@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sistematis, akurat, dan sesuai regulasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan KPU Kabupaten Dairi melalui pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi, praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pendampingan dan evaluasi. Peserta kegiatan terdiri atas bendahara dan pengelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai SAP. Selain itu, peserta mampu menyusun dokumen pertanggungjawaban secara lebih sistematis, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi sehingga pelaksanaan pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik; Standar Akuntansi Pemerintahan; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

Abstract

Accountable and transparent financial management is a crucial aspect of achieving good governance. As the election organizing body, the General Elections Commission

(KPU) is responsible for managing and accounting for budget utilization in accordance with Government Accounting Standards (SAP) and applicable laws and regulations. However, implementation challenges persist, notably a limited understanding of how to prepare financial accountability reports that are systematic, accurate, and compliant with regulations. This community service initiative aims to enhance the capacity of financial administrators at the Dairi Regency KPU by providing guidance on preparing financial accountability reports in accordance with Government Accounting Standards. The implementation method encompasses needs assessment, material presentation, discussions, practical exercises in report preparation, as well as ongoing guidance and evaluation. Participants included treasurers and financial administrators from the Dairi Regency KPU. The results indicate an improved understanding among participants regarding principles of accountability and transparency, as well as the procedures for preparing financial accountability reports in compliance with SAP. Furthermore, participants demonstrated the ability to compile accountability documents in a more systematic and comprehensive manner, adhering to prevailing regulations. This activity is expected to support improved financial governance within the Dairi Regency KPU, thereby ensuring that budget management becomes more effective, efficient, transparent, and accountable.

Keywords: Public Sector Accounting; Government Accounting Standards; Financial Accountability Report.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003). Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung oleh administrasi keuangan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelolaan anggaran tersebut menuntut adanya kompetensi pengelola keuangan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 2010).

Dalam praktiknya, pengelola keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, kompleksitas administrasi keuangan, serta perlunya peningkatan pemahaman terhadap penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan pendampingan yang tidak hanya memberikan pemahaman secara konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, masih diperlukan penguatan kapasitas bagi bendahara dan pengelola keuangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan agar proses

administrasi dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami alur penyusunan laporan, kelengkapan dokumen pendukung, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2026 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dengan sasaran bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, serta pengelola keuangan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Jumlah peserta sebanyak 15 orang.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Dairi untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Identifikasi dilakukan melalui diskusi, observasi, dan wawancara singkat dengan pengelola keuangan guna mengetahui kebutuhan pelatihan dan pendampingan.

2. Penyampaian Materi

Tim pengabdian memberikan materi mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan sektor publik, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi.

3. Praktik dan Pendampingan

Peserta melakukan praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan menggunakan contoh dokumen yang disesuaikan dengan kondisi di KPU Kabupaten Dairi. Selama praktik, tim pengabdian memberikan pendampingan secara langsung untuk membantu peserta memahami prosedur penyusunan laporan, pengelompokan bukti transaksi, serta penyelesaian kendala yang dihadapi.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, penugasan praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyebaran kuesioner kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan pendampingan selanjutnya.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, meningkatnya kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif antara tim pengabdian dan peserta sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dengan melibatkan 15 orang peserta yang terdiri atas bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, dan staf pengelola keuangan. Kegiatan berlangsung selama satu hari yang diawali dengan penyampaian materi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pendampingan secara langsung oleh tim pengabdian.

Pada tahap identifikasi kebutuhan diketahui bahwa sebagian peserta masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, terutama dalam penyusunan dokumen pendukung, pengarsipan bukti transaksi, serta pemahaman terhadap kesesuaian laporan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, materi dan praktik difokuskan pada penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Peserta

Indikator	Pre-test	Post-test
Pemahaman SAP	62	88
Penyusunan LPJ Keuangan	60	90
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	65	91
Transparansi Pengelolaan Keuangan	64	89
Rata-rata	62,75	89,50

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari **62,75** menjadi **89,50** atau meningkat sekitar **26,75 poin**. Selain peningkatan pengetahuan, hasil praktik menunjukkan bahwa peserta telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara lebih sistematis, melengkapi dokumen pendukung, serta memahami mekanisme penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain evaluasi pembelajaran, peserta juga diminta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, metode pendampingan mudah dipahami, serta praktik penyusunan laporan memberikan manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Pembahasan

Peningkatan hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dipadukan dengan praktik dan pendampingan secara langsung mampu meningkatkan kompetensi pengelola keuangan. Pendekatan ini memberikan

kesempatan kepada peserta untuk memahami konsep sekaligus mengaplikasikannya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. sejalan dengan Agustin dan Angelita (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan dan penerapan akuntansi sektor publik mampu meningkatkan pemahaman aparatur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan. Demikian pula, Dewi dan Argani (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik yang disertai pembinaan kepada aparatur dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mendukung terselenggaranya administrasi keuangan yang lebih akuntabel.

Pendampingan juga membantu peserta mengidentifikasi kesalahan administrasi yang sering terjadi, seperti ketidaksesuaian dokumen pendukung, kesalahan pengelompokan transaksi, dan kurang lengkapnya bukti pertanggungjawaban. Melalui bimbingan langsung, peserta memperoleh umpan balik sehingga mampu memperbaiki penyusunan laporan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola keuangan sektor publik yang baik. Kompetensi pengelola keuangan yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan juga mendukung pendapat Bastian (2018) yang menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menghasilkan informasi keuangan yang andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, Mahmudi (2019) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, dan kualitas administrasi keuangan. Hasil kegiatan ini juga memperkuat temuan Hendriarto et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kompetensi pengelola keuangan, kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi lebih baik sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan kegiatan juga terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta selama diskusi dan praktik. Peserta aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari, kemudian bersama tim pengabdian mencari solusi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Pendekatan tersebut menjadikan proses pembelajaran lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Hasil kegiatan ini relevan dengan penelitian Rininda dan Sudaryati (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas akuntabilitas dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran, sistem pengendalian manajerial, dan sistem pelaporan yang diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai pentingnya sistem pelaporan sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang akuntabel.

Sari (2021) dan Wibowo dan Santoso (2024) telah terverifikasi, keduanya dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta

efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, peningkatan kompetensi bendahara dan pengelola keuangan melalui pendampingan akan memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat, tertib administrasi, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi serta menjadi model pendampingan yang dapat diterapkan pada satuan kerja pemerintah lainnya.



Gambar 1. Poto Bersama Peserta Penyuluhan



Gambar 2. Poto Bersama Peserta Penyuluhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

pengelola keuangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, baik dari aspek konsep akuntabilitas dan transparansi maupun kemampuan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil pre-test dan post-test serta kemampuan peserta dalam menyelesaikan praktik penyusunan laporan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan, yaitu:

1. Kegiatan pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berkala agar kompetensi pengelola keuangan tetap terjaga dan mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku.
2. Diperlukan pengembangan materi pelatihan yang lebih mendalam, seperti pengelolaan keuangan berbasis aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.
3. KPU Kabupaten Dairi disarankan untuk memperkuat sistem dokumentasi dan standarisasi format laporan pertanggungjawaban agar meminimalkan perbedaan dalam penyusunan laporan antar pengelola.
4. Penelitian atau pengabdian selanjutnya dapat memperluas cakupan kegiatan dengan melibatkan unit kerja lain serta menambahkan evaluasi jangka panjang untuk mengukur keberlanjutan hasil pendampingan.

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi dapat semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pengelola keuangan, khususnya bendahara dan staf terkait, yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan pendampingan berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada institusi tempat penulis bernaung yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dairi serta menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2021). Penguatan akuntabilitas keuangan sektor publik melalui SAP. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(2), 45–57.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Agustin, V., & Angelita, E. P. (2025). Implementasi akuntansi sektor publik dalam pencatatan dan pelaporan keuangan kelurahan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun*, 5(1).
- Dewi, A. O., & Argani, D. A. (2025). Penerapan sistem akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun*, 5(1), 1–10.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hendriarto, P., et al. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(2), 59–69.
- Kurniawan, A., & Nugroho, R. (2022). Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis SAP. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 18(1), 33–44.
- Lestari, S., & Pratama, Y. (2023). Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmu Akuntansi Indonesia*, 14(2), 101–112.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Marsudi, A. U. (2025). Implementasi akuntansi sektor publik pada pengelolaan keuangan Disdukcapil. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun*, 5(2).
- NN Padang (2024). Pelatihan e-SPT. *Devotionis*, 43–45.
- NN Padang (2025). Pelatihan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72. *Devotionis*, 12–15.
- NN Padang (2026). Pelatihan Financial Literacy. *Devotionis*, 46–49.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rinin da, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sektor publik. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1099–1113.
- Sari, D. M. (2021). Akuntabilitas laporan keuangan sektor publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(3), 77–88.
- Wibowo, T., & Santoso, H. (2024). Efektivitas pengendalian internal pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(1), 55–66.